
PERENCANAAN EVALUASI KOLABORATIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERMUTU

Witri¹, Yanti Shantini²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² yanti.shantini@upi.edu

Received: November, 2025; Accepted: Januari, 2026

Abstract

The progress of a country can be observed through the level of its Human Development Index (HDI). A high HDI score indicates that a country is considered developed, whereas a low HDI score suggests that the country has not yet reached developed status. One strategy to improve HDI is through the implementation of community development and empowerment programs. These programs are more likely to succeed when supported by well-structured planning, particularly in terms of evaluation planning. Given that such programs require contributions from multiple parties, collaborative efforts are essential. Collaboration should take place from the initial planning stage through to the evaluation phase. During the evaluation planning stage, collaboration with various stakeholders is crucial to enhance the quality and effectiveness of the community development and empowerment initiatives.

Keywords: Collaborative Evaluation Planning, Stakeholders, Community Empowerment

Abstrak

Kemajuan sebuah negara dapat diamati dari sebuah nilai tinggi rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara tersebut. Tingginya angka IPM suatu negara dapat diartikan bahwa negara tersebut termasuk ke dalam negara maju begitupun sebaliknya, apabila angka IPM suatu negara rendah, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut belum termasuk kategori negara maju. IPM dapat ditingkatkan dengan dibuatnya suatu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila memiliki perencanaan yang cukup matang terutama dalam hal perencanaan evaluasi. Mengingat program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan program yang membutuhkan banyak bantuan dari semua pihak maka perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi tersebut dapat terjadi dari mulai proses perencanaan sampai tahapan evaluasi program. Dalam tahapan perencanaan evaluasi, kolaborasi dilakukan dengan berbagai stakeholder sehingga dapat meningkatkan kualitas dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digagas.

Kata Kunci: Perencanaan Evaluasi Kolaborasi, Stakeholder, Pemberdayaan Masyarakat

How to Cite: Witri & Shantini, Y. (2026). Perencanaan Evaluasi Kolaboratif dalam Rangka Mewujudkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Bermutu. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 9 (1), 143-151.

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang secara luas digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara, semakin besar pula kemungkinannya untuk dikategorikan sebagai negara maju. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum berjalan secara optimal (UNDP, 2022; Todaro & Smith, 2020).

Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1990, IPM telah menjadi alat ukur strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan IPM, baik melalui kebijakan nasional maupun program pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Program-program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penguatan sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang menyertainya (Bappenas, 2021).

Salah satu contoh program yang menuai banyak kritik adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang diluncurkan dengan tujuan memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan. Meskipun program ini bersifat partisipatif, pelaksanaannya dinilai kurang tepat sasaran dan belum berhasil mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Evaluasi dari GAPRI menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam program ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah, sementara masyarakat miskin tetap berada dalam situasi yang sulit (Sibarani, 2019; Binbangkum, 2015).

Kegagalan sebagian program pembangunan masyarakat sering kali berakar pada perencanaan yang kurang matang. Perencanaan yang tergesa-gesa tanpa melibatkan analisis mendalam dan strategi evaluasi yang jelas dapat menyebabkan program kehilangan arah dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi komponen krusial dalam siklus manajemen program. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menilai keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (Rossi et al., 2018).

Lebih jauh lagi, perkembangan masyarakat abad ke-21 menuntut pendekatan kolaboratif dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi. Kolaborasi memungkinkan berbagai pihak baik pemerintah, komunitas, akademisi, sektor swasta, maupun media untuk berbagi sumber daya, perspektif, dan kepakaran. Pendekatan kolaboratif dalam perencanaan evaluasi juga memperkuat legitimasi dan relevansi program di mata masyarakat (Redhana, 2019; Ansell & Gash, 2008). Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fairuza (2017) mengkaji keberhasilan kolaborasi multistakeholder dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat, sementara Febrian (2016) menekankan pentingnya *collaborative governance* dalam membangun kawasan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui studi literatur ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses perencanaan evaluasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dapat mendukung mutu dan keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utama kajian terletak pada identifikasi prinsip-prinsip, tahapan, dan aktor yang berperan dalam perencanaan evaluasi kolaboratif. Studi ini penting untuk memperkuat fondasi konseptual dan operasional dalam praktik manajemen pembangunan berbasis kemitraan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur (*literature review*) yang bersifat semi-sistematis dan bersumber dari beragam publikasi akademik, laporan kebijakan, serta dokumen program terkait perencanaan evaluasi kolaboratif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Studi literatur dipilih karena relevan untuk menjelaskan suatu fenomena dari perspektif konseptual dan empiris berdasarkan penelitian terdahulu. Pendekatan

studi literatur ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola, praktik, tantangan, serta prinsip-prinsip evaluasi program yang melibatkan multipihak secara kolaboratif.

Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional, serta repositori ilmiah seperti *Google Scholar*. Penelusuran literatur difokuskan pada publikasi dalam rentang waktu 2010–2025 untuk menjamin keterkinian temuan, namun beberapa sumber klasik seperti *Human Development Report* dari UNDP juga disertakan sebagai rujukan teoritik dasar. Kata kunci utama yang digunakan meliputi “perencanaan evaluasi”, “program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, “*stakeholder*”, “*pentahelix*”, dan “kolaborasi multipihak”.

Seleksi literatur dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi melalui judul dan abstrak, penyaringan teks lengkap berdasarkan relevansi substansi, hingga penelusuran kutipan lanjutan untuk melengkapi kajian. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis secara tematik dengan mengklasifikasikan isi berdasarkan domain kajian, yakni konsep dan tahapan perencanaan evaluasi, hubungan antara pembangunan masyarakat dengan IPM, peran pemangku kepentingan dan unsur penta helix, prinsip kolaborasi dalam perencanaan evaluasi, serta studi kasus praktik evaluasi di Indonesia. Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana kualitas perencanaan evaluasi dapat memengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Tabel Matriks Pemetaan Temuan Evaluasi Kolaboratif

Tema	Sumber Literatur	Kontribusi Utama	Implikasi
Urgensi Perencanaan Evaluasi	Sibarani (2019)	Evaluasi sebagai pondasi keberhasilan program; penentu arah pengembangan.	Perencanaan evaluasi harus menjadi bagian awal dalam siklus program.
Prinsip Kolaboratif dalam Evaluasi	Sufianti (2011); Bahua (2018)	Kolaborasi memperkuat legitimasi, keterbukaan, dan hasil evaluasi yang disepakati.	Evaluasi perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dan dialogis.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan & Penta Helix	Khusniyah (2020); Yunas (2019)	Peran multi-aktor menentukan efektivitas dan keberlanjutan program.	Program perlu menjamin pelibatan aktif semua unsur penta helix.
Tantangan Implementasi Evaluasi Kolaboratif	Oktavia & Saharuddin (2013); Freedman (1975)	Tantangan koordinasi dan kapasitas evaluatif; perlunya penguatan institusional.	Diperlukan pelatihan, pendanaan, dan mekanisme koordinasi efektif.

Tema	Sumber Literatur	Kontribusi Utama	Implikasi
Implikasi terhadap Mutu Program dan IPM	Bahua (2018); Sufianti (2014); Giesen (2002)	Evaluasi kolaboratif mampu meningkatkan responsivitas dan capaian IPM.	Evaluasi berbasis kolaborasi mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif dan adaptif.

Pembahasan

Perencanaan Evaluasi

Dalam berbagai macam hal, proses evaluasi merupakan sebuah unsur yang tidak dapat dihilangkan dan sangat penting karena melalui evaluasi keberjalanan suatu program dapat terlihat. Disisi lain, hasil evaluasi dapat memberikan solusi dan alternatif lain apabila dalam keberjalanannya tersebut masih terdapat tantangan dan hambatan. Evaluasi suatu program adalah sebuah proses pemantauan dan penyesuaian yang diinginkan oleh para evaluator untuk menentukan dan juga meningkatkan kualitas dari program yang diamati. Proses evaluasi program merupakan bagian dari proses manajemen sehingga dalam pelaksanaannya pun mengacu pada konsep manajemen yang dimulai dari tahapan perencanaan evaluasi, implementasi evaluasi, sampai pada tahap evaluasi proses evaluasi. Menurut G.R. Terry dalam (Maripah, 2017), perencanaan evaluasi adalah suatu proses yang terus menerus berlangsung serta merupakan suatu proses pemilihan, penghubungan fakta, dan perumusan asumsi mengenai hal – hal yang diinginkan terjadi di masa mendatang. Proses perencanaan evaluasi dilakukan dengan cara melakukan proses penggambaran dan perumusan kepentingan mengenai proses evaluasi yang akan dilakukan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

Suatu proses evaluasi harus direncanakan dengan sangat rinci dan sistematis. Proses awal perencanaan evaluasi dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, pemilihan strategi yang tepat untuk proses evaluasi program, memantau perubahan yang terjadi selama proses evaluasi atau monitoring, serta mengukur dari dampak adanya perubahan tersebut. Proses perencanaan evaluasi merupakan bagian yang paling penting dalam proses evaluasi secara keseluruhan karena dengan perencanaan yang baik diharapkan bahwa implementasi evaluasi akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilewati dalam merencanakan suatu evaluasi yaitu dimulai dari perumusan tujuan diadakannya evaluasi serta perumusan masalah mengenai mengapa evaluasi harus dilakukan, menentukan jenis data yang akan mendukung dalam proses evaluasi, menentukan sasaran evaluasi, menentukan model evaluasi yang akan dipakai dan disesuaikan dengan tujuan evaluasi, menentukan instrumen evaluasi dan orang yang terlibat dalam proses evaluasi, merencanakan biaya evaluasi, serta merencanakan jadwal dari kegiatan evaluasi. Perencanaan evaluasi bertujuan untuk merincikan mengenai strategi untuk mendapatkan dan menganalisis data yang akan ditunjukkan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program.

Kelompok atau individu yang terlibat erat dalam proses evaluasi termasuk (1) sponsor, yang merupakan lembaga atau individu yang memiliki wewenang atas proses penilaian dan memiliki wewenang untuk menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan bagi klien untuk diaudit atau dievaluasi (2) klien, yaitu sebuah organisasi atau individu yang memerlukan proses audit untuk pemangku kepentingan, (3) peserta, (4) pemangku kepentingan, yaitu pihak yang terkena dampak audit, hasil penilaian dan (5) publik, yaitu individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan dalam penilaian dan penerimaan hasil. (UPI, n.d.)

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam suatu program pembangunan yang dicanangkan pasti terdapat program pemberdayaan didalamnya yang diikut sertakan karena pada dasarnya proses pemberdayaan adalah suatu proses memberikan kekuatan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mandiri dan mampu meningkatkan kualitas kehidupannya. Adapun konsep pemberdayaan masyarakat menurut Paul dalam (Rahman, 2016) yaitu suatu proses pembagian kekuasaan yang dilakukan secara adil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik kelompok masyarakat yang lemah dan juga memperbesar pengaruhnya dalam proses dan juga hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Person bahwa proses pemberdayaan adalah suatu proses yang diberikan oleh sekelompok atau beberapa pihak dan bertujuan agar setiap orang dapat memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses monitoring dan dapat mempengaruhi suatu fenomena serta lembaga - lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Dalam proses pemberdayaan ditekankan agar masyarakat sasaran dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup sehingga dapat berpengaruh pada kehidupan dirinya sendiri maupun pada kehidupan orang di sekitarnya. Selain itu juga Ife (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki arti yaitu suatu proses penyiapan sumber daya terutama sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan serta memperluas kesempatan dan juga peluang bagi masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kompetensi dirinya dan dapat lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan. Friedman (1992) menyatakan bahwa proses pemberdayaan lahir karena adanya asumsi yaitu mengenai adanya suatu kegagalan dalam model - model pembangunan sehingga tidak dapat menanggulangi berbagai macam masalah dan memenuhi harapan yang muncul dari masyarakat. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digagas harus bersifat inklusif dan demokratis. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk menaikkan angka IPM suatu negara.

Wasistiono (2003) menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan keseluruhan strategi pembangunan masyarakat sipil merupakan konsekuensi yang sangat logis dari penggunaan nilai-nilai universal, yaitu demokrasi. Agar masyarakat dapat meningkatkan perannya dalam proses pembangunan bangsa yang maju, diperlukan kemauan masyarakat, pemerintah, dan elemen bangsa lainnya dalam bentuk kemauan dan tindakan politik (Rahman, 2016). Edi Suharto dalam (Endah, 2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan menerapkan suatu pendekatan yang dapat disingkat dengan singkatan 5P. Pendekatan 5P tersebut diantaranya yaitu (1) pemungkinan, pada tahapan ini terjadi suatu proses penciptaan lingkungan, suasana, atau strategi yang dapat memungkinkan masyarakat yang ikut serta dengan program pemberdayaan dapat berkembang secara optimal, (2) penguatan, yaitu sebuah proses peningkatan kompetensi masyarakat sasaran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan sehingga masyarakat mampu dan mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, (3) perlindungan, yaitu sebuah tahapan yang dilakukan bagi masyarakat yang masih lemah sehingga tidak terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat yang masih lemah dengan yang sudah berdaya dan juga meminimalisir adanya persaingan yang tidak adil dan seimbang dengan bentuk eksploitasi dan penindasan, (4) penyokongan, yaitu proses pemberian dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya dengan baik dan tidak merasa terpinggirkan, (5) pemeliharaan, yaitu sebuah proses yang dilakukan agar tercipta iklim yang kondusif dan seimbang sehingga setiap masyarakat dapat mempunyai kesempatan yang

sama untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah pemberdayaan sendiri sering dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas individu memiliki kontrol atas hidupnya yang membuktikan bahwa ia berdaya (Endah, 2020). Menurut Eger, Miller, dan Scarless (2018) dalam (Umanailo, 2018) tujuan utama dalam pelaksanaan suatu proses pembangunan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berdaya, berdedikasi, serta memiliki kemampuan dan juga kekuatan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dicanangkan yang didalamnya terdapat proses pemberdayaan dan pembangunan. Menurut Wirutomo (2012) dalam (Fathy, 2019) menyatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup semua tingkatan sosial atau inklusif dan harus bersifat “community based empowerment” (CBE) karena pada kenyataannya bahwa masyarakat hidup dan beraktivitas dalam berbagai ikatan komunitas yang masing - masing tumbuh sehingga membentuk ikatan komunitas yang cukup erat. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan berupa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dapat mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat.

Dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdapat unsur yang saling bersinergi dalam setiap proses keberjalanan program. Unsur tersebut disebut sebagai Penta helix yang mencakup bidang Academic, Business, Community, Government, dan Media yang berperan dalam membantu untuk mempercepat pengembangan program. Setiap unsur yang termasuk ke dalam penta helix tersebut mempunyai tugas dan perannya masing - masing dalam suatu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun peran dari masing - masing unsur diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Akademisi berperan sebagai konseptor suatu program. Akademisi berperan dalam melakukan identifikasi potensi yang kemudian nantinya akan dijadikan acuan dalam pengembangan program dan diselaraskan dengan pengetahuan konsep dan teori - teori yang relevan.
2. Sektor swasta atau business, berperan sebagai penghubung yang dapat menghadirkan modal dan juga infrastruktur penunjang keberjalanan program.
3. Komunitas mempunyai peran sebagai akselerator program. Komunitas disini dapat berarti sebagai masyarakat yang mempromosikan program yang dicanangkan sehingga akan banyak masyarakat lain yang terpengaruh dan ikut terlibat dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan (Khusniyah, 2020)
4. Pemerintah berperan sebagai regulator dan juga berperan sebagai kontroler atau pengawas yang memiliki peraturan berupa undang – undang serta tanggung jawab dalam mengembangkan suatu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Media harus bisa bertindak sebagai expander yaitu sebagai pendukung dalam mendukung publikasi dan promosi mengenai suatu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Media juga harus bisa mempublikasikan mengenai brand image dari program pembangunan dan pemberdayaan tersebut sehingga dapat menarik atensi khalayak luas (Yunas, 2019)

Pihak yang Terlibat dalam Perencanaan Evaluasi

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan audit atau evaluasi dikenal dengan istilah *stakeholders* atau pemangku kepentingan. *Stakeholder* adalah sekelompok pihak atau individu yang dimaksudkan untuk membantu memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Saputri, n.d.). Menurut Freedman (1975) dalam (Oktavia & Saharuddin, 2013) stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan program. *Stakeholder* juga didefinisikan sebagai orang-

orang dengan kepentingan dan keputusannya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan kelompok. Suatu pihak dapat dikatakan sebagai pemangku kepentingan jika memiliki ciri-ciri seperti yang ditunjukkan oleh Budimanta et al (2008), yaitu kekuasaan, pengakuan, dan minat terhadap program. Klasifikasi pemangku kepentingan meliputi sebagai berikut yaitu :

1. Orang yang mengatur adegan atau menyimpan statistik adalah pengaruh besar tetapi mendapat sedikit perhatian.
2. Aktor kunci yang tertarik dalam pengembangan rencana evaluasi program
3. Kesenambungan topik atau informasi, yaitu pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruh yang rendah dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
4. Kerumunan atau supervisor adalah pemangku kepentingan dengan sedikit minat dan pengaruh pada hasil yang diinginkan dan pertimbangan ini untuk memasukkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh dan preferensi akan berubah seiring waktu sehingga perlu ditimbang.

Perencanaan Evaluasi Kolaboratif

Di kehidupan abad - 21, kolaborasi merupakan hal yang sering dilakukan dalam membuat suatu hal termasuk program pembangunan. Dalam kolaborasi tentunya terdapat adanya partisipasi dari semua unsur yang terlibat karena tidak mungkin suatu kolaborasi hanya dilakukan oleh satu unsur saja. Kata kolaborasi ini berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti yaitu sebuah proses penyatuan tenaga dan peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disetujui dan ditetapkan. O'leary (2010) dalam (Saleh, n.d.) menyebutkan bahwa kata kolaborasi ini sering dimaknai sebagai proses penyelesaian masalah yang sifatnya lintas batas dan hubungan. Selain itu juga kolaborasi dapat dimaknai sebagai sebuah situasi yang menggambarkan terjadinya kerja sama antar unsur yang mempunyai pemahaman yang sama terhadap masalah yang dihadapi dan bersama - sama mencari penyelesaian atas permasalahan tersebut. Hubungan antar unsur dalam proses kolaborasi sangat intens dan komunikatif. Upaya kolaborasi ini dapat dilakukan dalam hal apapun termasuk dalam hal perencanaan evaluasi program.

Dalam proses perencanaan kolaboratif, banyak elemen yang berbeda perlu dilibatkan. Makna partisipasi menurut Ngari (2001) dalam (Bahua, 2018) adalah suatu bentuk komunikasi dan interaksi yang harmonis untuk menciptakan rasa kebebasan atau demokrasi dan terjalannya rasa persatuan. Menurut Gaventa dan Valderama dalam (Bahua, 2018), ada tiga konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan pembangunan masyarakat demokratis, yaitu: (1) partisipasi politik, (2) partisipasi masyarakat dan (3) partisipasi rakyat (hak sipil).

Perencanaan audit kolaboratif adalah proses perencanaan audit partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan dan aktor yang terlibat dalam proses audit. Perencanaan penilaian kolaboratif didasarkan pada konsep strukturalis Giddens dan tindakan komunikatif Habermas, sehingga proses perencanaan penilaian kolaboratif meliputi proses komunikasi, dialog, dan transformasi di dalam. Ada proses saling belajar antara mitra. Menurut Innes dan Booher (2000) dalam (Sufianti, 2011) menjelaskan bahwa proses perencanaan penilaian kolaboratif akan berhasil jika ada konsistensi dan saling ketergantungan antara berbagai faktor yang terlibat dalam proses perencanaan evaluasi. Proses kolaboratif ini merupakan proses pendewasaan pendapat dari berbagai pihak yang pada akhirnya bermuara pada suatu pendapat yang disepakati bersama, yaitu konsensus. Dalam proses perencanaan penilaian kolaboratif, antara lain perlu dibangun komitmen (Sufianti, 2014). Perencanaan penilaian kolaboratif

(perencanaan kooperatif) adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan banyak pemangku kepentingan yang berbeda, yang dapat melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan duduk bersama mereka untuk secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan yang tersisa dan kemudian mencari solusi. Perencanaan kolaboratif adalah perencanaan berbasis komunikasi (rasionalitas komunikatif). Rencana tinjauan kemitraan akan berjalan lancar jika memenuhi prasyarat kerjasama, antara lain:

1. Tujuan kerjasama harus ditetapkan terlebih dahulu agar semua pemangku kepentingan dapat memahami dan memahami kemajuan proses kerjasama.
2. Kerjasama dibentuk atas dasar keadaan tertentu sehingga para pihak harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan penilaian dan digunakan sebagai titik acuan untuk penilaian proses kerjasama. Menurut Brna (1998) dan Giesen (2002), gambaran lengkap dari prasyarat tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Ada kesepakatan umum untuk berkolaborasi antar berbagai elemen yang terkait dengan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
 - b. Masing-masing mitra harus dapat saling memanfaatkan model dan kemampuan yang dimiliki masing-masing
 - c. Masing-masing pihak menyepakati visi dan tujuan yang disepakati selama proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama
 - d. Setiap kelompok harus saling berbagi pemahaman tentang berbagai masalah yang dihadapi

KESIMPULAN

Perencanaan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan manajemen program karena tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Perencanaan evaluasi yang dirancang secara cermat sejak awal memungkinkan identifikasi kebutuhan, pemantauan pelaksanaan, dan penilaian dampak program dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif menjadi sangat relevan karena mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan lembaga mitra, dalam setiap proses perencanaan evaluasi. Temuan studi literatur menunjukkan bahwa penerapan evaluasi yang melibatkan kerja sama lintas sektor memperkuat akuntabilitas, meningkatkan rasa kepemilikan program, serta mempercepat tercapainya solusi yang tepat. Kolaborasi dalam proses evaluasi juga membuka ruang dialog dan pembelajaran bersama, yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program ke depan. Dengan demikian, untuk menjamin bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas, maka perencanaan evaluasi harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya teknis tetapi juga inklusif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 32–35.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* (M. Mirnawati (ed.); 2nd ed.). Ideas Publishing.
- Bappenas. (2021). *RPJMN 2020–2024*.

- Binbangkum, S. I.-D. (2015). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI).
- Endah, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA. *Jurnal Moderat*, 6(1), 135–143.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). 1–13. <https://repository.unair.ac.id>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Febrian, R. A. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana : Jurnal Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, II(1), 200–208.
- Khusniyah. (2020). IMPLEMENTASI MODEL PENTAHHELIX SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN KEDIRI. *SNAPAN : Prosiding Seminar Nasional Kahuripan*, 159–163.
- Maripah. (2017). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa(rpjmdes) di desa pangkalan baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar. *Jom Fisip*, 4(2), 1–15.
- Oktavia, S., & Saharuddin. (2013). HUBUNGAN PERAN STAKEHOLDERS DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM AGROPOLITAN DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(03), 231–246.
- Peter Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). *Evaluation: A systematic approach*.
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Wedana : Jurnal Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, II(1), 189–199.
- Redhana, I. W. (2019). MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21 DALAM PEMBELAJARAN KIMIA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1), 2239–2253.
- Saleh, C. (n.d.). Konsep , Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi.
- Saputri, A. Y. (n.d.). Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). 1–10.
- Sibarani, I. M. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Indicators : Jorunal Of Economics and Bussiness*, 1(17), 41–47.
- Sufianti, E. (2011). PERENCANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(3), 322–329.
- Sufianti, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 77–95.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.
- Umanailo, M. C. B. (2018). Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]. *Proceeding of Community Development*, 2, 268–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319>
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*.
- UPI, D. A. P. (n.d.). Perencanaan evaluasi. 1. <https://fileupi.edu>
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan : Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>